



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raden Saleh No. 12 Telepon 40330 - 40331 Fax. 40332
<http://dishub.sumbarprov.go.id>
PADANG

Padang, 19 Januari 2023

Nomor : 050 / 51 / Dishub-SB / I / 2023
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2022

Kepada Yth.:
Bapak Gubernur Sumatera Barat
Cq. Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Barat

di-

TEMPAT

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No: 065 / 1036.b / ED / GSB - 2022 tanggal 30 November 2022 tentang penyampaian hasil pengukuran dan analisa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berdasarkan format yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



DEDY DIANTOLANI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721222 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2022

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu institusi karena pada LAKIP dilaporkan capaian indikator kinerja tahun 2022 yang mencakup aspek pendukung yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya good governance dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, diharapkan sebagai upaya dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun.

Dalam penyusunan LAKIP tersebut masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang positif dan kritik yang konstruktif guna mengembangkan kinerja peneliti sehingga LAKIP tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pada masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan ide / gagasan dalam menyusun LAKIP ini.



DEDY DIANTOLANI, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721222 199403 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan / digariskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan Pelayanan atau Pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas Aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2021 - 2026 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas telah menetapkan 5 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan Pengukuran Kinerja Instansi, yaitu:

- 1) Jumlah Trayek Yang Diakses
- 2) Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
- 3) V/C Rasio di jalan Provinsi
- 4) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
- 5) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari rata – rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dalam tahun 2022 nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan dengan total pagu dana Rp.17.260.017.358 pada APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp. 16.713.545.918,70, (96,83%), dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja gaji dan tunjangan dengan anggaran sebesar Rp.8.500.719.778, terealisasi sebesar Rp.8.221.061.578, (96,71%).
- Belanja Penunjang Urusan dengan anggaran sebesar Rp.4.326.828.998, terealisasi sebesar Rp.4.197.203.964,80, (97 %).
- Belanja urusan sebesar Rp.4.432.468.582, terealisasi sebesar Rp.4.295.280.375,90 (96,90 %)



Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 8 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 % yaitu:

1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000, terealisasi sebesar Rp. 40.444.946 (89,88%). Sisa anggaran sebesar 4.555.054 merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja asuransi kendaraan, dan biaya pajak bumi dan bangunan rumah dinas tahun 2022.

2. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.128.874.750, realisasi sebesar Rp. 89.528.331 (69,47%). Sisa anggaran Rp. 39.346.419 merupakan sisa belanja lembur petugas retribusi terminal yang teranggarkan melebihi 15 jam / orang / bulan sebagaimana yang diatur Pergub SSH 2022.

3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.835.000, terealisasi sebesar Rp. 35.597.990,00 (85,09 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 6.237.010 merupakan Merupakan efisiensi dari belanja service Komputer, Printer, AC, dan peralatan kantor Lainnya.

4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.583.293, realisasi sebesar Rp. 8.013.250,00 (83,62 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.570.043 yang merupakan Merupakan efisiensi dari belanja Perjalanan dinas dan belanja Bahan Bakar Minyak

5. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 109.780.000, terealisasi sebesar Rp. 81.529.849,00 (74,27%), dengan sisa anggaran sebesar Rp.28.250.151. Untuk Pelaksanaan pengawasan angkutan perintis (Damri) sudah dilakukan pada semua daerah yang dilayani angkutan perintis (Kab Dharmasraya, Kab Padang Pariaman, Kab Pasaman, Kab Kep Mentawai), namun untuk sisa anggaran menjadi SILPA pada akhir tahun



yaitu terkait kurangnya volume pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan dan akan dijadikan bahan evaluasi dalam plot anggaran untuk sub kegiatan ini di tahun 2023.

6. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.80.000.000, realisasi sebesar Rp. 69.569.000 (86,96%). Sisa anggaran Rp. 10.431.000 Merupakan efisiensi anggaran berupa sisa kontrak pengadaan Paket PC dan Printer untuk mendukung pengoperasian Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU).

7. Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.34.920.000, terealisasi sebesar Rp.28.819.350,00 (82,53%). Sisa anggaran sebesar Rp. 6.100.650 merupakan Efisiensi anggaran perjalanan dinas dan BBM.

8. Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.55.251.250, realisasi sebesar Rp.46.916.595 (84,91%) dan sisa anggaran sebesar Rp.8.334.655 yang merupakan Efisiensi anggaran perjalanan dinas dan BBM.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan-penyempurnaan Kinerja Dinas untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Organisasi	1
A.1. Latar Belakang	1
A.2. Tugas pokok dan fungsi.....	2
A.3. Struktur Organisasi.....	3
A.4. Sumber daya Manusia	5
B. Aspek Strategis Organisasi.....	8
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	22
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	22
C. Capaian Kinerja Organisasi	25
C.1.Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	25
C.2.Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	39
C.3.Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	42
C.4.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Kementrian Perhubungan)	44
C.5.Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	49
C.6.Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	52
D. Realisasi Anggaran.....	73
BAB IV PENUTUP.....	74
LAMPIRAN	76



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel I. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon.....	5
Tabel I. 3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	5
Tabel I. 4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Tabel I. 5	Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	8
Tabel II. 1	Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	13
Tabel II. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	14
Tabel II. 3	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	16
Tabel II. 4	Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	18
Tabel II. 5	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022	19
Tabel II. 6	saran evaluator Kementerian PAN dan RB pada evaluasi SAKIP dan RB tanggal 14 September 2022	20
Tabel II. 7	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2022	21
Tabel III. 1	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....	22
Tabel III. 2	Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022	23
Tabel III. 3	Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022	25
Tabel III. 4	Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses	27
Tabel III. 5	Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum ..	29
Tabel III. 6	Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi	32
Tabel III. 7	Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.....	33



Tabel III. 8	Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	33
Tabel III. 9	hasil survei ke masyarakat terhadap pelayanan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	34
Tabel III. 10	Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	35
Tabel III. 11	Target dan realisasi Rasio Konektivitas	37
Tabel III. 12	Sasaran dan Indikator Kinerja untuk tercapainya Rasio Konektivitas.....	38
Tabel III. 13	Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya.....	39
Tabel III. 14	Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.....	42
Tabel III. 15	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dengan Kementerian Perhubungan	46
Tabel III. 16	Analisis permasalahan dan factor penghambat / pendorong kinerja.....	49
Tabel III. 17	Daftar Sub Kegiatan yang Dilakukan Penambahan dan Pengurangan Anggaran	53
Tabel III. 18	Rincian anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp.17.260.017.358.....	73
Tabel III. 19	Realisasi anggaran tahun 2022 sesuai berdasarkan Program	73



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Organisasi

A.1. Latar Belakang

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 00 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 30 30' Lintang Selatan (LS), dan 980 36' sampai 1010 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat: berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat $\pm 42.012,89 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ km}^2$, dengan panjang pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ km}$, sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ km}$.

Dengan demikian, posisi Provinsi Sumatera Barat yang strategis berada pada jalur perekonomian dan berada pada lintasan pergerakan antar wilayah di Pulau Sumatera, sehingga memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, dan informasi. Berdasarkan kondisi diatas dipastikan akan menyebabkan tingginya kebutuhan transportasi.

Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor transportasi secara umum masih dihadapkan pada peningkatan infrastruktur, kelancaran dan keselamatan mobilitas angkutan Darat, Laut dan Udara, serta aksebilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai.

Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas baru, serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, tingkat ketersediaan armada angkutan yang masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil, menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat terpencil kurang dapat berkembang.



Pembangunan pada sektor perhubungan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok daerah, oleh karena itu pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas Provinsi Sumatera Barat dari Gubernur Sumatera Barat sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026 yaitu dengan mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan.

Dalam rangka mencapai target – target Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Sumatera Barat di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dimana tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan.

Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban, dimana salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, sebagai wujud komitmen organisasi penyelenggara Negara dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Oleh karena itu melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

A.2. Tugas pokok dan fungsi

Menurut Peraturan Gubernur (pergub) Sumatera Barat No. 03 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Sumatera Barat di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Perhubungan yaitu Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan, yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
 - c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - d. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.
 - e. Pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, dan Pelayaran.
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.3. Struktur Organisasi

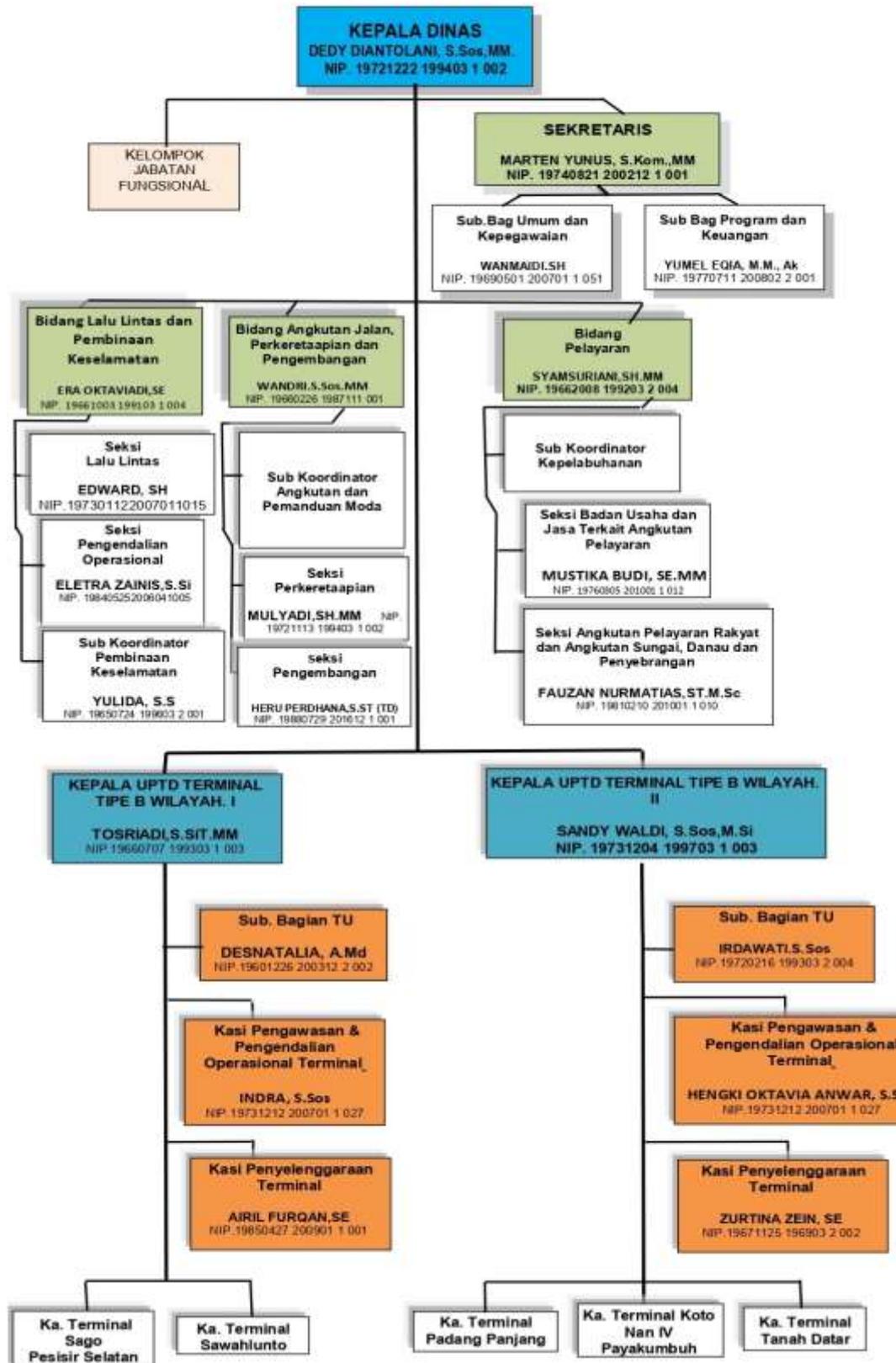
Dasar:

1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 03 tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 19 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
3. Persetujuan Penyederhanaan Birokrasi oleh Kemendagri melalui penyetaraan Jabatan di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sehingga terdapat 3 Jabatan Struktural yang di rubah menjadi Jabatan Fungsional sesuai Keputusan Menpan RB nomor : 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah.

Berdasarkan hal diatas, berikut susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022:

KONSEP BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



A.4. Sumber daya Manusia

Jumlah Pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Kondisi Desember 2022 adalah sebanyak 83 Orang, berikut rinciannya:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	BERDASARKAN GOLONGAN	JUMLAH
1	GOL I	-
2	GOL II	31
3	GOL III	41
4	GOL IV	11
	TOTAL	83

Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon

NO	BERDASARKAN ESSELON	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	6
3	ESELON IV	14
4	STAF	62
	TOTAL	83

Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S.2	11
2	S.1/D.4	31
3	D.3	10
4	D.2/D.1/SLTA	31
5	SLTP/SD	-
	TOTAL	83

Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BERDASARKAN JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	60
2	PEREMPUAN	23
	TOTAL	83



Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Terkait pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah dilakukan kerja sama (MoU) dengan pihak Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat). Dimulai sejak tahun 2014 tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat nomor 384/VI/HK201/STTD-2014 dan nomor 120-4/GSD/2014. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan lagi perpanjangan selama 5 tahun tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat nomor HK.201/6/14/STTD-2019 dan nomor 120-030-PKS/GSB-2019. Dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 sudah bertambahnya pegawai teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.

Hasil dari MoU tersebut, hingga saat ini kebutuhan pelaksanaan yang sifatnya teknis secara umum sudah dapat terpenuhi. Namun disisi lain tenaga pelaksana yang bersifat administratif masih sangat kurang dari segi kuantitas dan kualitas (kompetensi). Hal ini disebabkan oleh:

- a) Lemahnya pengelolaan dalam hal analisa jabatan dan analisis beban kerja yang menyebabkan komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai belum rasional.
- b) Kompetensi, disiplin, kemampuan, profesionalitas, dan produktifitas sebagian besar PNS belum memadai.
- c) Belum maksimalnya perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis kinerja.
- d) Kurangnya diklat/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pelaksana sesuai dengan jabatannya.
- e) Penguasaan teknologi informatika dan bahasa asing yang belum memadai, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan interaksi antar bangsa dalam memanfaatkan peluang global, pemasaran investasi dan inovasi masyarakat bangsa, serta pemulihan dan peningkatan citra peradaban bangsa.



Sumber daya Lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan yaitu berupa fasilitas yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Sarana dan prasarana utama di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat antara lain terdiri dari satu gedung utama yang mempunyai 2 lantai yang didalamnya terdapat beberapa ruangan seperti ruangan Kepala Dinas, ruangan Sekretaris, serta 7 ruangan untuk masing – masing bidang atau sub bagian yang ada di kantor Dinas Perhubungan, pada gedung utama tersebut juga memiliki 3 aula, serta memiliki toilet di masing – masing lantainya. Kemudian untuk gedung lain di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yaitu antara lain memiliki 1 bangunan mushola, 1 kantin, 1 gedung gudang, serta 1 gedung tambahan khusus bidang Lalu lintas yaitu gedung seksi Pengendalian Operasional. Kemudian untuk membantu dalam pengamanan pada pintu masuk dan keluar kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga memiliki pos satpam. Untuk kondisi gedung yang terdapat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, semua gedungnya masih layak digunakan, namun masih perlu dilakukannya pemeliharaan setiap tahunnya.

Sarana dan prasarana tambahan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, untuk fasilitas tambahan dalam bidang teknologi informasi antara lain sudah dilengkapi dengan beberapa komputer di masing – masing bidang serta memiliki jaringan internet yang lumayan bagus. Kemudian untuk sarana penunjang untuk bagian transportasi Dinas Perhubungan juga memiliki beberapa kendaraan dinas, kendaraan dinas bagian pengendalian operasional, bus sedang, serta satu mobil derek. Untuk keadaan semua kendaraan dinasnya masih bagus dan masih bisa membantu operasional pekerjaan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

B. Aspek Strategis Organisasi

Menurut Peraturan Gubernur (pergub) Sumatera Barat No. 03 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Sumatera Barat di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Sumatera Barat. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a) Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
- b) Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;
- c) Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya dan perlintasan sebidang kereta api mengakibatkan belum tercapainya target penurunan kecelakaan.
- d) Masih Rendahnya Kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana Perhubungan

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dapat diperoleh melalui analisis Renstra Kementerian Perhubungan dan Analisis telahaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Tabel I. 5 Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
1	Tingginya pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak	Tingkat kepatuhan perusahaan transporter dan pemilik barang masih rendah	1. Perlunya penguatan terhadap regulasi terkait pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sumber daya manusia 2. Dukungan dari stakeholder yang	Dalam menekan tingginya pelanggaran Over Dimensi Over Loading yang sangat berdampak kepada keselamatan

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
	kepada keselamatan pengguna jalan		terkait unsur Perhubungan	pengguna jalan harus dilaksanakannya penegakan hukum secara komprehensif dan berkelanjutan
2	Belum optimalnya pelabuhan penyeberangan yang ada untuk melayani pergerakan orang dan barang antar pulau dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (konektivitas antar pulau)	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas antar pulau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan angkutan penyeberangan di Provinsi Sumatera Barat sudah menjadi bagian dari cetak biru pengembangan transportasi penyeberangan tahun 2010 – 2030 2. Perlunya penguatan terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sumber daya manusia 	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan angkutan sungai danau dan penyeberangan (memantapkan lintas penyeberangan antar negara, pelabuhan angkutan penyeberangan serta pengembangan dermaga penyeberangan)
3	Masih ada wilayah kepulauan dan pesisir yang belum terpenuhinya prasarana, sarana dan layanan transportasi yang memadai dalam memperkuat poros maritim di Provinsi Sumatera Barat	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam memperkuat poros maritim di Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelimpahan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2. Kewenangan daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan 	Sistem jaringan transportasi laut meliputi tatanan kepelabuhanan (pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan regional seperti pelabuhan Tua Pejat (Kep. Mentawai), pelabuhan Siuban (Kep. Mentawai), pelabuhan Muara Siberut (Kep. Mentawai), pelabuhan Muaro Padang (Padang), pelabuhan pengumpan lokal) dan alur pelayaran (dikembangkannya disepanjang perairan laut dalam)

No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
4	Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan di berbagai moda transportasi	Belum seimbangnya antara kebutuhan dan penyediaan sarana prasarana transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kajian terhadap kebutuhan pelayanan transportasi 2. Penguatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi 	Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan (trans sumatera, pembangunan jaringan jalan bebas hambatan), jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (terminal penumpang tipe B di lima Kabupaten/Kota
5	Penurunan Level of Service (LoS) jalan yang ditandai peningkatan rasio volume dibandingkan kapasitas jalan salah satunya disebabkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi	Peningkatan volume lalu lintas di bandingkan kapasitas jalan yang tersedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan 2. Terlaksananya Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan 3. Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi 	Pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas jalan dalam rangka peningkatan Level Of Service (LOS) jalan
6	Belum optimalnya moda alternatif angkutan barang untuk mengurangi beban jalan (transportasi jalan rel (kereta api) di Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan Trans Sumatera Railways System	Tingginya Pergerakan Angkutan Barang dibandingkan Angkutan Orang di Provinsi Sumatera Barat	Sistem jaringan transportasi yang meliputi jaringan kereta api (rencana pengembangan jalur utama, jalur lokal dan pengembangan prasarana serta sarana kereta api antar kota)
7	Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis Perhubungan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya	Masih rendahnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan pengelolaan terminal tipe B dan pelabuhan pengumpan regional memerlukan SDM yang berkompeten 2. Kewenangan pengawasan dan 	Dengan peningkatan kompetensi SDM Perhubungan dapat mewujudkan pelayanan transportasi yang optimal



No	Kondisi Eksisting	Tantangan	Peluang	Arah Pengembangan Pelayanan
	Manusia (SDM) Perhubungan	meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan	pengendalian lalu lintas angkutan jalan memerlukan tenaga SDM penegak hukum bidang perhubungan (PPNS)	

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu kritikal yang mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan yang dihadapi oleh Sektor Perhubungan di Provinsi Sumatera Barat atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap kinerja Sektor Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Berbagai permasalahan pembangunan bidang perhubungan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan, mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang perhubungan.

Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perhubungan Kab/Kota, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kemudian berdasarkan hasil analisis tim penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat maka ditetapkanlah Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Mengupayakan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, baik yang terjadi di Jalan Raya dan Perlintasan sebidang.
2. Mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana terminal type B.
3. Penanganan terpadu danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak)
4. Mendukung pelaksanaan program tol laut dan angkutan perintis melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat



Sumatera, dan mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera sebagai jalur alternative pelayaran selain selat malaka.

5. Reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)-Solok- Muara Kalaban (Sawahlunto).
6. Mendorong reaktivasi dan konektivitas jalur kereta api Sumatera Barat dan Riau

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, yang meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2022. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 serta Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.

Upaya yang dilaksanakan untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut adalah dengan menetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dimana untuk Dinas Perhubungan mendukung pencapaian Misi 6.

Tabel II. 1 Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Kepala Daerah		
Misi 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Dan Merata IK: Indeks Kinerja Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Terintegrasi	Rasio Konektivitas

Strategi dan Kebijakan

Untuk mendukung dan mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam misi ke-6, strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang adalah dengan menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel II. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan"			
Misi 6: "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermodal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil2. Dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian dan perikanan3. Dukungan keterpaduan transportasi antar moda (bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api)
		Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan sistem perijinan transportasi2. Perbaikan sarana dan prasarana terminal Tipe B3. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan
		Penguatan kelembagaan dan	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,objek wisata dan simpul transportasi



Visi: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan"			
Misi 6: "Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		standar pelayanan Angkutan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan regulasi penguatan kelembagaan dalam pengelolaan transportasi sesuai dengan kewenangan 3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
		Peningkatan dan pengembangan fasilitas keselamatan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi 2. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan 3. Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perizinan serta standar pelayanan 4. Membangun kesadaran masyarakat dan penegakan hukum tertib berlalu lintas

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 2 Misi, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan dan mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi dengan cara meningkatkan Pelayanan, Fungsi Forum Koordinasi Lalu Lintas Angkutan & Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Transportasi.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel II. 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Organisasi	Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas
Terwujudnya keselamatan Transportasi	Rasio angka Kecelakaan lalu lintas
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi



Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 4 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah trayek yang di akses	Trayek	5	5	5	5	5	5
		Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum	Orang	18.000.000	19.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
2	Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan Provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	Rasio	0,54	0,52	0,50	0,48	0,47	0,45
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	BB 70,00	BB 71,00	BB 71,50	BB 72,00	BB 72,50	BB 73,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	%	78%	79%	80%	81%	82%	83%

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah rencana pencapaian target yang menjadi sasaran bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Perhubungan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan tahun 2022 adalah tahun awal untuk Renstra Dinas Perhubungan periode tahun 2021-2026, dikarenakan untuk tahun 2021 merupakan bagian dari Renstra Dinas Perhubungan 2016 – 2021 dan merupakan tahun dasar (Kondisi Awal) terhadap target pada Tahun 2022.

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2022

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	79%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.942.449.099	APBD

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.197.397.002	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	943.666.538	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	120.676.000	APBD
JUMLAH		9.204.188.639	APBD

Setelah Anggaran 2022 dilaksanakan, dan dalam rangka menindaklanjuti saran evaluator Kementerian PAN dan RB pada evaluasi SAKIP dan RB tanggal 14 September 2022, Dinas Perhubungan Sumatera Barat melakukan perubahan meliputi:

1. Penyempurnaan atau merubah sasaran dan indikator terkait kinerja internal organisasi.

Tabel II. 6 saran evaluator Kementerian PAN dan RB pada evaluasi SAKIP dan RB tanggal 14 September 2022

Sasaran dan Indikator Lama	Penyempurnaan Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi
Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	Indikator Kinerja: Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi

2. Perubahan anggaran menyesuaikan dengan kondisi anggaran setelah anggaran perubahan, dimana terjadi perubahan pagu dana Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk efektifitas dalam kebutuhan pelaksanaan realisasi keuangan.

Perubahan yang dilakukan dalam rencana pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yaitu:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN : 2022

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	79%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.326.828.998	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.718.357.794	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	623.939.538	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	90.171.250	APBD
JUMLAH		8.759.297.580	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (performance gap), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sebagai informasi tambahan Metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.

Tabel III. 1 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Kurang

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Dari 4 Sasaran Strategis ditetapkan 5 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Trayek Yang Diakses
2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

3. V/C Rasio di jalan Provinsi
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
5. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 2 Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek	6 Trayek	120 %
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang	18.650.012 orang	98,15 %
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52	0,53	98,07
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB	71,83	101,16 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	79%	79,58%	100,73 %
Rata – rata Capaian					103,62 %

Untuk persentase (%) capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$
 (Jika Realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik)



b. $\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

(Jika Realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik)

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah bagus. Dari 5 (lima) indikator tersebut rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

C. Capain Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu Instansi Pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan.

Capaian Kinerja Organisasi yaitu penyajian terkait pencapaian masing – masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

C.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Dari 4 Sasaran Strategis ditetapkan 5 Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Trayek Yang Diakses
2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum
3. V/C Rasio di jalan Provinsi
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
5. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 3 Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek	6 Trayek	120 %
		Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang	18.650.012 orang	98,15 %
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52	0,53	98,07
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB	71,83	101,16 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Organisasi				
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	79%	79,58%	100,73 %
Rata – rata Capaian					103,62 %

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah bagus. Dari 5 (lima) indikator tersebut rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan formulasi dari setiap indikator yang ditetapkan:

Indikator Kinerja Utama 1:

Jumlah Trayek Yang Diakses

Jumlah Trayek yang di Akses di tahun – n

Indikator kinerja pertama yaitu, Jumlah trayek yang diakses. Dengan target sebesar 5 Trayek dapat terealisasi sebesar 6 Trayek dengan capaian kinerja 120 %. Untuk jumlah trayek yang di akses tahun 2022 yaitu menjadi 6 trayek dengan adanya peresmian trayek transportasi Damri oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wil III Sumatera Barat selaku pelaksana kegiatan pelayanan angkutan perintis, dimana untuk saat ini trayek yang baru diresmikan tersebut mempunyai 2 (dua) bus Damri yang melayani rute Tua Pejat – Rokot (Kab. Kep. Mentawai).

Pencapaian target ini didorong koordinasi yang baik antar Kab / Kota / KL dalam pengawasan Angkutan Umum, Angkutan Perintis, Angkutan Penyeberangan dan Angkutan Laut.

Tabel III. 4 Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja jumlah trayek yang diakses

Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	352.779.510	319.575.227	90,59
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	109.780.000	81.529.849	74,27
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	115.620.000	114.823.520	99,31
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut KewenanganProvinsi	115.620.000	114.823.520	99,31
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk	83.424.538	83.394.330	99,96

Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	83.424.538	83.394.330	99,96
Pembangunan, Penerbitan Izin dan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	424.895.000	395.348.637	93,05
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	107.000.000	100.693.918	94,11
Pengoperasian pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional	309.735.000	286.494.719	92,50
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	877.797.082	853.902.468,90	97,28
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	686.879.582	675.832.633,09	98,39
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	190.917.500	178.069.835,81	93,27

Indikator Kinerja Utama 2:

Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

Jumlah penumpang terangkut di Terminal Tipe B pada tahun-n

Berdasarkan rumus diatas target penumpang pada tahun 2022 sebanyak 19.000.000 penumpang terangkut, sedangkan realisasi penumpang terangkut sebanyak 18.650.012 orang. Data diperoleh dan didapatkan dari rekapan penumpang terangkut di 5 Terminal Tipe B yang ada di Sumatera Barat.

Beberapa faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target penumpang terangkut antara lain:

- Adanya angkutan umum yang tidak beroperasi, sehingga berkurangnya penumpang terangkut di terminal, kemudian adanya naik turun penumpang yang dilakukan di luar terminal sehingga tidak terdata penumpang yang naik dan turun di terminal.
- Adanya pelaksanaan razia gabungan sehingga angkutan umum tersebut melakukan penyimpangan trayek dan tidak melalui terminal penumpang Tipe B.
- Adanya angkutan liar yang beroperasi (travel liar) sehingga menurunkan minat menggunakan angkutan umum.

Tabel III. 5 Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum

Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	546.108.250	531.731.035	97,37
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	115.000.000	106.357.194	92,48
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	221.963.000	219.058.486	98,69
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	84.145.250	81.410.620	96,75

Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	125.000.000	124.904.735	99,92
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	352.779.510	319.575.227	90,59
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	242.999.510	238.045.378	97,96
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	80.000.000	69.569.000	86,96
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80.000.000	69.569.000	86,96
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	189.020.000	188.915.000	99,94
Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal	144.802.400	144.734.400	99,95

Indikator Kinerja Utama 3:

V/C Rasio di jalan Provinsi

Formula Penghitungan = V/C Rasio di jalan Provinsi x 100 %

$$= 1564/2950 \times 100 \%$$

$$= 0,53 = 53 \%$$

- *V/C Ratio adalah Perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan*
- *= (Volume Lalu lintas Kendaraan di ruas Jalan Provinsi) / (Kapasitas Ruas Jalan Provinsi)*
- *Sesuai standar MKJI 1997 (manual kapasitas jalan indonesia) dan PKJI (Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia) 2014. Semakin tinggi kecepatan waktu tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas*

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui V/C rasio di ruas jalan provinsi adalah 0,53, dapat diketahui kinerja lalu lintas di ruas jalan Provinsi dapat diartikan bahwa kinerja lalu lintas bagus, arus cukup stabil, dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.

Ada beberapa hal yang menghambat kinerja lalu lintas di ruas jalan Provinsi, seperti:

- Adanya angkutan umum yang tidak beroperasi yang mendorong penggunaan kendaraan pribadi, hal ini juga disebabkan karena masih banyaknya angkutan yang belum memperpanjang KP, maupun izin trayek.
- Berdasarkan data pemeriksaan laik jalan dapat diketahui masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan, sehingga ketika diperjalanan menghambat kinerja lalu lintas yang ada.

Tabel III. 6 Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja V/C Rasio di jalan Provinsi

Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lintas Jaringan Jalan Provinsi	1.663.069.659	1.654.271.963	99,47
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	563.069.659	560.057.011	99,46
Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	1.100.000.000	1.094.214.952	99,47
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	9.583.293	8.013.250	83,62
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	9.583.293	8.013.250	83,62
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	189.020.000	188.915.000	99,94
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan bermotor	44.217.600	44.180.600	99,92

Indikator Kinerja Utama 4:

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah maka di peroleh nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah 71,83, dengan capaian kinerja yaitu 101,16 %.

Tabel III. 7 Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212.697.210	208.754.726	98,15
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.319.040	118.819.550	98,75

Indikator Kinerja Utama 5:

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tabel III. 8 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

METODE PENGHITUNGAN:

Perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4

- Pilihan A bernilai 4
- Pilihan B bernilai 3
- Pilihan C bernilai 2
- Pilihan D bernilai 1

Contoh Cara Perhitungan

Dari 11 Pertanyaan (untuk responden 1 orang) misalnya:

- 4 Pertanyaan dinilai "A" → 4 X 4 = 16
- 3 Pertanyaan dinilai "B" → 3 X 3 = 9
- 3 Pertanyaan dinilai "C" → 3 X 2 = 6
- 1 Pertanyaan dinilai "D" → 1 X 1 = 1

TOTAL 32

Nilai Maksimal 44 (11 pertanyaan x 4)

$$\text{Nilai IKM} = \frac{32}{44} \times 100\% = 72,73 = \text{Mutu Layanan C (Kurang Baik)}$$

Secara Keseluruhan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi sebesar **79,58** dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 9 hasil survei ke masyarakat terhadap pelayanan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
U1	86,525	B	Baik
U2	85,28	B	Baik
U3	80,225	B	Baik
U4	74,025	C	Kurang Baik
U5	75,84	C	Kurang Baik
U6	80,2	B	Baik
U7	80,6225	B	Baik
U8	74,225	C	Kurang Baik
U9	79,275	B	Baik
Rata-rata	79,58		

Berdasarkan rumus diatas target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 79%, sedangkan realisasi pada tahun 2022 adalah 79,58%, sehingga capaian indikator kinerja sarannya adalah sebesar 100,73%.

Tabel III. 10 Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212.697.210	208.754.726	98,15
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.319.040	118.819.550	98,75



Dalam terwujudnya pengukuran capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan cascading yang memiliki tujuan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (rasio konektivitas). Dimana untuk variabel yang mempengaruhi Rasio Konektivitas Sumatera Barat yaitu angkutan jalan, dan ASDP (angkutan sungai, danau dan Penyeberangan) yang mana angkutan tersebut membantu dalam menghubungkan antar wilayah di Sumatera Barat.

Berikut merupakan formulasinya :

Rasio konektivitas Provinsi

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

1. IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut).
2. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)

1) IK 1 (Angkutan Jalan)

$$= \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}}$$

$$= \frac{134 \times 1}{183}$$

$$= 0,732$$

2) IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)

$$= \frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan Intas penyeberangan pada provinsi tersebut}}$$

$$= \frac{4 \times 0,5}{4}$$

$$= 0,5$$



Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Note: Bobot angkutan jalan = 70 dan Bobot untuk ASDP = 30 (sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020)

$$= (0,732 \times 70) + (0,5 \times 30)$$

$$= 51,24 + 15$$

$$= 66,24 / 0,662$$

Rasio Konektivitas 0,662 artinya sebanyak 0,662 atau 66,24% wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan laut.

Tabel III. 11 Target dan realisasi Rasio Konektivitas

TUJUAN			
Meningkatnya konektivitas antar wilayah			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%CAPAIAN
Rasio Konektivitas	0,668	0,662	99,10 %

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Konektivitas, dan untuk mengukur tercapainya tujuan tersebut terdapat sasaran dan beberapa indikator kinerja.

Sasarannya yaitu Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi dan indikator kinerjanya yaitu jumlah trayek yang di akses dan jumlah penumpang terangkut angkutan umum.

Tabel III. 12 Sasaran dan Indikator Kinerja untuk tercapainya Rasio Konektivitas

SASARAN I			
Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%CAPAIAN
1. Jumlah trayek yang di akses	5 Trayek	6 Trayek	120 %
2. jumlah penumpang terangkut angkutan umum.	19.000.000 orang	18.650.012 orang	98,15 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, secara kumulatif dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja pertama yaitu Jumlah trayek yang diakses, dengan target sebesar 5 trayek dapat terealisasi sebesar 6 trayek dengan capaian kinerja 120%. Hal ini ditunjang dengan adanya peresmian trayek transportasi Damri oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wil III Sumatera Barat, serta dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja seperti:

1. Pengawasan Angkutan Perintis (Damri) yang beroperasi pada 4 (empat) daerah yaitu Kab Dharmasraya, Pasaman, Padang Pariaman, dan Kab.Kep. Mentawai.
2. Melakukan pengawasan angkutan perintis di pelabuhan-pelabuhan singgah, dimana untuk Provinsi Sumatera Barat dilayani oleh 2 (dua) unit kapal angkutan laut perintis yaitu KM. Sabuk Nusantara 37 untuk trayek R-3 dan KM. Sabuk Nusantara 68 untuk trayek R-4

Indikator kinerja kedua yaitu jumlah penumpang terangkut angkutan umum, dengan target sebesar 19.000.000 orang dapat terealisasi sebesar 18.650.012 orang dengan capaian kinerja 98,15 %.

Dari beberapa kegiatan di atas dalam mendukung kinerja sasaran-1 juga berdampak kepada meningkatnya kesadaran operator angkutan umum dalam aturan berlalu lintas yang aman dan selamat untuk menunjang sarana yang lebih baik. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari koordinasi yang baik, juga peran serta seluruh elemen dan instansi yang terlibat dalam pengawasan dan penertiban lalu lintas.

C.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 terjadi perbedaan dalam penentuan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, dimana Tahun 2022 adalah tahun awal untuk Renstra Dinas Perhubungan periode tahun 2021-2026, dikarenakan untuk tahun 2021 merupakan bagian dari Renstra Dinas Perhubungan 2016 – 2021 dan merupakan tahun dasar (Kondisi Awal) terhadap target pada Tahun 2022.

Tabel III. 13 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Realisasi		% Capaian	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	Persentase Jumlah Sarana yang Berfungsi Baik	-	51%	-	52,41%	-	102,77	-
		Persentase Jumlah Prasarana yang Berfungsi Baik dan Prasarana	-	23%	-	23,34%	-	101,48	-

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Realisasi		% Capaian	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
		yang Dibangun							
Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah Trayek yang Diakses	Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek	5 Trayek	5 Trayek	6 Trayek	100	120
		Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut	Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	1.000.000 orang	19.000.000	1.127.254 orang	18.650.012 orang	113	98,15
-	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	-	V/C Rasio di jalan Provinsi	-	0,52	-	0,53	-	98,07
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	-	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	-	4,89%	-	4,16%	-	116,298	-
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,00)	BB (71,00)	BB (70,14)	BB (71,83)	100,2	101,16



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Realisasi		% Capaian	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Organisasi	Kinerja							
-	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	-	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	-	79%		79,58%	-	100,73 %
4 Sasaran Strategis	4 Sasaran Strategis	6 Indikator Kinerja	5 Indikator Kinerja						

Dari tabel perbandingan antara Tahun 2021 dan 2022, dapat dijelaskan yaitu adanya perbedaan indikator pada tahun 2021 sebanyak 6 indikator kinerja sasaran menjadi 5 indikator kinerja sasaran pada tahun 2022, namun masih ada indikator kinerja sasaran yang sama dan untuk capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel diatas.

C.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Tabel III. 14 Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n							
			2021	Kinerja Awal 2021 (Renstra 2016 - 2021)	2022	Realisasi	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah trayek yang di akses	5	5	5	6	5	5	5	5
		Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum	18.000.000	18.127.254	19.000.000	18.650.012	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
2	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan Provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,54	0,54	0,52	0,53	0,50	0,48	0,47	0,45
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB 70,00	BB 70,14	BB 71,00	BB 71,83	BB 71,50	BB 72,00	BB 72,50	BB 73,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n							
			2021	Kinerja Awal 2021 (Renstra 2016 - 2021)	2022	Realisasi	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	78%		79%	79,58	80%	81%	82%	83%

Dari tabel diatas dapat dilihat target masing – masing indikator kinerja sasaran setiap tahunnya beserta realisasinya pada tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas masih ada beberapa tahun lagi untuk dapat melihat tingkat kemajuan terkait capaian renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, dikarenakan untuk tahun 2022 merupakan tahun awal dari perencanaan yang ada pada Renstra 2021 – 2026, yang nantinya berdasarkan capaian pada tahun 2022 ini diharapkan bisa menjadi evaluasi untuk pencapaian target pada tahun – tahun selanjutnya.



C.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Kementerian Perhubungan)

1. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan

Berdasarkan 7 (Tujuh) prioritas nasional yang terdapat pada RPJMN 2020-2024, salah satunya yaitu “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”.

Kemudian dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Presiden pada Tahun 2020 – 2024 dimana untuk sektor perhubungan mempunyai fokus kegiatan yang harus ditangani untuk menunjang capaian misi, terutama pada misi 2, misi 3 dan misi 4, maka hal ini menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan Penyusunan rencana strategis pada tahun 2020 – 2024.

Visi Kementerian Perhubungan adalah “Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi
3. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi
4. Tercapainya rekstrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan
5. Mewujudkan penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan.”



Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka ditetapkan beberapa misi, dimana untuk sektor perhubungan terdapat pada misi ke 6 (enam) “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan”.

Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 tersebut adalah “terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata”.

Misi 6 ini diuraikan menjadi 5 sasaran, dimana salah satunya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, yaitu: “Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi” dengan Indikator Kinerja yaitu Rasio Konektivitas.

Kemudian sebagai OPD Penanggung Jawab, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tujuan – tujuan yang harus dicapai berdasarkan renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Dengan demikian menunjukkan bahwa adanya relevansi antara visi misi Kementerian Perhubungan, visi misi Kepala Negara dan Kepala Daerah periode berjalan dengan dukungan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam membantu mewujudkan visi misi tersebut, dimana kata kunci dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan secara umum yaitu terkait pembangunan infrastruktur yang dapat membantu penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar Kawasan serta meningkat keselamatan transportasi.

Tabel III. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dengan Kementerian Perhubungan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran		2022			
						Target		Realisasi	
Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Meningkatnya konektivitas antar wilayah IK: Rasio Konektivitas	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	Rasio Konektivitas Nasional	Jumlah trayek yang di akses	0,709	5 trayek	0,545 (Oktober)	6 trayek
					Jumlah Penumpang Terangkut angkutan umum		19.000.000 orang		18.650.012 orang
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Terwujudnya Keselamatan Transportasi IK: Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan	V/C Rasio di jalan Provinsi	24,29	0,52	19,62 (Oktober)	0,53

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran		2022			
						Target		Realisasi	
Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov	Nasional	Pemprov
Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani IK: a. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kinerja Pelayananan Transportasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	85	BB 71,00	94,13 (Oktober)	BB 71,83
	b. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	On Time Performance Layanan Transportasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	74,64%	79%	60,56 (Oktober)	79,58%

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kementerian Perhubungan diperoleh dari Peraturan Menteri Perhubungan No PM 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, sedangkan untuk data target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Terkait Rasio Konektivitas

Untuk Kementerian Perhubungan rasio konektivitas merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran, sedangkan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Rasio Konektivitas merupakan Indikator Kinerja Tujuan, dimana



untuk mengukur tercapainya indikator kinerja tujuan tersebut terdapat indikator kinerja sasaran yaitu jumlah trayek yang di akses dan jumlah penumpang terangkut angkutan umum.

Setelah dilakukan penghitungan Rasio Konektivitas Provinsi yaitu 0,662 atau 66,2 % wilayah Sumatera Barat sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan laut.

2. Terkait keselamatan dan keamanan transportasi

Untuk keselamatan dan keamanan transportasi Kementerian Perhubungan lebih berfokus kepada meningkatkan keselamatan dan menurunkan angka kecelakaan sehingga indikator kinerja sasarannya yaitu Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan, sedangkan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam indikator kinerja sasarannya V/C Rasio di jalan Provinsi, dengan harapan setelah melakukan beberapa upaya terkait keselamatan dan keamanan transportasi dapat meningkatkan kinerja lalu lintas di jalan Provinsi.

3. Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara indikator yang ada pada Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat belum selaras sepenuhnya, tetapi masing – masing indikator di Dinas Perhubungan Provinsi secara prinsip turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kementerian (Pusat).

C.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel III. 16 Analisis permasalahan dan factor penghambat / pendorong kinerja

Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1) Jumlah Trayek Yang Diakses 2) Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan, perizinan, dan Pengawasan angkutan umum • Belum optimalnya sarana dan prasarana transportasi yang melayani • Belum memadainya kuantitas, kualitas dan kualifikasi SDM Perhubungan dalam memberikan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya angkutan umum yang tidak memperpanjang KP maupun izin trayek, sehingga dari data tidak dapat diketahui apakah suatu lintasan trayek masih dilayani oleh angkutan atau tidak • Adanya angkutan umum yang tidak beroperasi, sehingga menyebabkan tidak terdatanya penumpang di terminal • Adanya naik turun penumpang yang dilakukan di luar Terminal sehingga tidak terdata penumpang yang naik dan turun di terminal • Adanya angkutan liar yang beroperasi (travel liar) sehingga menurunkan minat menggunakan angkutan umum 	Adanya kegiatan – kegiatan di Dinas Perhubungan yang mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah
3) V/C Rasio di jalan Provinsi	Belum optimalnya usaha dan upaya	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya angkutan umum yang tidak beroperasi yang mendorong penggunaan 	Adanya kegiatan di Dinas Perhubungan yang



Indikator Kinerja	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	dalam mengatasi kecelakaan, meningkatkan keselamatan, serta meningkatkan kinerja lalu lintas	<p>kendaraan pribadi, hal ini juga disebabkan karena masih banyaknya angkutan yang belum memperpanjang KP, maupun izin trayek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan data pemeriksaan laik jalan dapat diketahui masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan, sehingga Ketika diperjalanan dapat menghambat kinerja lalu lintas yang ada • Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait keselamatan lalu lintas 	mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas
<p>4) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD</p> <p>5) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi</p>	-	-	<p>Adanya kegiatan kegiatan – kegiatan yang mendukung capaian target indikator Dinas Perhubungan serta adanya monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat agar dapat sesuai dengan Dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat.</p>



Dari hasil analisa terhadap kegiatan terkait dengan pencapaian target kinerja dapat disimpulkan bahwa penyebab keberhasilan pencapaian kinerja di beberapa kegiatan dikarenakan hal – hal sebagai berikut:

- a) Adanya Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
- b) Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai.
- c) Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
- d) Koordinasi yang intens baik internal maupun eksternal.

Sementara penyebab kegagalan atau penurunan kinerja pada beberapa kegiatan disebabkan antara lain:

- a) Kurang tepatnya dalam menetapkan target kinerja, karena belum jelas antara output dan outcome yang ingin dicapai
- b) Kurangnya evaluasi terhadap target dan besaran target berdasarkan data series 5 tahun kebelakang.

Solusi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja terkait dengan hambatan yang ada di dalam proses pelaksanaan kegiatan:

- a) Mengevaluasi ulang target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
- b) Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
- c) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan secara berkala



C.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah termasuk Prestasi Kerja yang dicapai atas Penggunaan Anggaran. Prestasi Kerja yang dimaksud disini adalah kinerja yang didefinisikan sebagai keluaran / hasil dari kegiatan / Program yang hendak dicapai sehubungan dengan Penggunaan Anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk pencapaian kinerja terbaik tentunya memerlukan analisa yang tepat, menyangkut Sumber Daya yang ada, antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia.
- b. Sumber Dana / Anggaran.

Analisis dari efisiensi sumber daya dari kondisi yang ada saat ini di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat:

- a. Sumber Daya Manusia.
 - 1) Dalam hal pengelolaan SDM, harus mendapat perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Sehingga pendistribusian pegawai sesuai dengan kebutuhan, terutama pada bidang-bidang yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja.
 - 2) Kompetensi, disiplin, kemampuan, profesionalitas, dan produktifitas sebagian besar PNS belum memadai.
 - 3) Masih kurangnya tenaga yang kompeten harus diminimalisir dengan memperbanyak kuantitas (volume) diklat – diklat teknis yang berkesesuaian dengan kebutuhan kerja.
 - 4) Terkait kebutuhan tenaga teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah dilakukan kerja sama (MoU) dengan pihak Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat). Dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 sudah bertambahnya pegawai teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.

b. Sumber Dana / Anggaran

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran sangat menentukan dalam pencapaian target kinerja. Karena dalam Target Kinerja SKPD, yang diukur tidak hanya pencapaian fisik dari kegiatan, tetapi juga realisasi keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Karena hal ini memperlihatkan sesuai atau tidaknya proses perencanaan dengan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan.

Untuk mendukung urusan wajib Perhubungan Th. 2022 dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp.17.260.017.358**, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp.8.500.719.778**, dan Belanja Langsung (BL) **Rp.8.759.297.580**.

Untuk **realisasi** anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp.8.221.061.578 / (96,71%)** dan **realisasi** anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp.8.492.484.340,70 / (99,90 %)**.

Tabel III. 17 Daftar Sub Kegiatan yang Dilakukan Penambahan dan Pengurangan Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Belanja		
		Anggaran APBD 2022	Anggaran APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.703.277.437	17.260.017.358	556.739.921
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	11.441.537.897	12.827.548.776	1.386.010.879
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000	212.697.210	37.697.210
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	92.378.170	17.378.170
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	120.319.040	20.319.040

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Belanja		
		Anggaran APBD 2022	Anggaran APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.178.224.838	8.789.728.168	611.503.330
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.873.224.838	8.500.719.778	627.494.940
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	265.000.000	187.610.000	-77.390.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	37.829.750	32.829.750
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	35.000.000	63.568.640	28.568.640
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	81.193.000	87.543.000	6.350.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	36.193.000	42.543.000	6.350.000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	45.000.000	45.000.000	0
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	128.874.750	128.874.750
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	128.874.750	128.874.750
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.500.000	163.076.949	21.576.949
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91.500.000	95.000.000	3.500.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	50.000.000	68.076.949	18.076.949

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Belanja		
		Anggaran APBD 2022	Anggaran APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
	Perundang-Undangan			
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.559.210	629.442.585	123.883.375
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	35.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.016.760	11.556.760	1.540.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.542.450	156.309.800	40.767.350
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000	55.000.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	26.000.000	6.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.000.000	345.576.025	75.576.025
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.460.549	337.820.646	335.360.097
	Pengadaan Mebel	-	63.312.800	63.312.800
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	229.686.326	229.686.326
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.460.549	44.821.520	42.360.971
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.967.600.300	2.000.889.748	33.289.448
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	14.000.000	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Belanja		
		Anggaran APBD 2022	Anggaran APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	287.446.660	37.446.660
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.703.600.300	1.699.443.088	-4.157.212
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.000.000	477.475.720	87.475.720
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.000.000	257.540.720	82.540.720
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000	178.100.000	-1.900.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	41.835.000	6.835.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.197.397.002	3.718.357.794	- 479.039.208
10	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	524.332.000	-	- 524.332.000
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	486.212.000	-	-486.212.000
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	38.120.000	-	-38.120.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Belanja		
		Anggaran APBD 2022	Anggaran APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
	Provinsi			
11	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	746.852.000	877.797.082	130.945.082
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	555.934.500	686.879.582	130.945.082
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	190.917.500	190.917.500	0
12	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	681.824.050	546.108.250	-135.715.800
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	221.963.000	221.963.000	0
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	75.000.000	84.145.250	9.145.250
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	125.000.000	125.000.000	0
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	259.861.050	115.000.000	-144.861.050
13	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.608.225.659	1.663.069.659	54.844.000
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	508.225.659	563.069.659	54.844.000
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.100.000.000	1.100.000.000	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Belanja		
		Anggaran APBD 2022	Anggaran APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
14	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	21.703.293	9.583.293	- 12.120.000
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	21.703.293	9.583.293	-12.120.000
15	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	189.020.000	189.020.000	0
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana uji Berkala Kendaraan Bermotor	44.217.600	44.217.600	0
	Pelaksana Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	144.802.400	144.802.400	0
16	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	345.440.000	352.779.510	7.339.510
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250.000.000	242.999.510	-7.000.490
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	95.440.000	109.780.000	14.340.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Belanja		
		Anggaran APBD 2022	Anggaran APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
17	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	80.000.000	80.000.000	0
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80.000.000	80.000.000	0
C	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	943.666.538	623.939.538	- 319.727.000
18	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	115.620.000	115.620.000	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	115.620.000	115.620.000	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Belanja		
		Anggaran APBD 2022	Anggaran APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
19	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	68.424.538	83.424.538	15.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	68.424.538	83.424.538	15.000.000
20	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	759.622.000	424.895.000	- 334.727.000 0
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	382.887.000	8.160.000	-374.727.000
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	309.735.000	309.735.000	0
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	67.000.000	107.000.000	40.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Belanja		
		Anggaran APBD 2022	Anggaran APBD Perubahan 2022	Bertambah / Berkurang
D	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	120.676.000	90.171.250	- 30.504.750
21	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	34.920.000	34.920.000	0
	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	34.920.000	34.920.000	0
22	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	85.756.000	55.251.250	- 30.504.750
	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	85.756.000	55.251.250	-30.504.750
	JUMLAH	16.703.277.437	17.260.017.358	556.739.921

Berikut ini realisasi fisik dan keuangan setelah anggaran APBD Perubahan Tahun 2022:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Anggaran = Rp. 92.378.170,
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 89.935.176, (97,36%)
 - Sisa anggaran = Rp. 2.442.994,

- 
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Anggaran = Rp. 120.319.040,
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 118.819.550, (98,75%)
 - Sisa anggaran = Rp. 1.499.490,
 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Anggaran = Rp. 8.500.719.778,
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 8.221.061.578, (96,71%)
 - Sisa anggaran = Rp. 279.658.200,
 4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Anggaran = Rp. 187.610.000,
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 182.924.500, (97,50%)
 - Sisa anggaran = Rp. 4.685.500,
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Anggaran = Rp. 37.829.750,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp.35.954.721,00,- (95,04%)
 - Sisa anggaran = Rp. 1.875.029,-
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Anggaran = Rp.63.568.640,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp.62.667.800,00,- (98,58%)
 - Sisa anggaran = Rp.900.840,-
 7. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Anggaran = Rp. 42.543.000,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 42.466.462,00,- (99,82%)
 - Sisa anggaran = Rp.76.538,-
 8. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - Anggaran = Rp.45.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 40.444.946,00,- (89,88%)
 - Sisa anggaran = Rp. 4.555.054,-

- 
9. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - Anggaran = Rp.128.874.750,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp.89.528.331,00,- (69,47 %)
 - Sisa anggaran = Rp.39.346.419,-
 10. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Anggaran = Rp.95.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp.94.840.790,00,- (99,83 %)
 - Sisa anggaran = Rp.159.210,-
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Anggaran = Rp.68.076.949,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 67.851.846,- (99.67 %)
 - Sisa anggaran = Rp. 225.103,-
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Anggaran = Rp.35.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 34.989.000,00,- (99.97%)
 - Sisa anggaran = Rp.11.000,-
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Anggaran = Rp. 11.556.760,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 11.355.500,00,- (98,26%)
 - Sisa anggaran = Rp. 201.260,-
 14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Anggaran = Rp. 156.309.800,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 155.343.800,00,- (99,38 %)
 - Sisa anggaran = Rp. 966.000,-
 15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Anggaran = Rp. 55.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 54.988.258,00,- (99,98 %)
 - Sisa anggaran = Rp. 11.742,-

- 
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Anggaran = Rp. 26.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 25.935.000,- (99,75 %)
 - Sisa anggaran = Rp. 65.000,-
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Anggaran = Rp. 345.576.025,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 345.386.684,00,- (99,95 %)
 - Sisa anggaran = Rp.189.341,-
18. Pengadaan Mebel
- Anggaran = Rp. 63.312.800,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 60.660.000,- (95,81%)
 - Sisa anggaran = Rp. 2.652.800,-
19. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Anggaran = Rp. 229.686.326,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 216.605.250,00,- (94,30%)
 - Sisa anggaran = Rp. 13.081.076,-
20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Anggaran = Rp. 44.821.520,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 44.395.200,00,- (99,05%)
 - Sisa anggaran = Rp. 426.320,-
21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Anggaran = Rp. 14.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 13.682.350,- (97,73 %)
 - Sisa anggaran = Rp.317.650,-
22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Anggaran = Rp. 287.446.660,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 277.318.140,00,- (96,48%)
 - Sisa anggaran = Rp. 10.128.520,-

- 
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Anggaran = Rp. 1.699.443.088,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 1.670.284.623,- (98,28 %)
 - Sisa anggaran = Rp. 29.158.465,-
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Anggaran = Rp. 257.540.720,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp.247.526.030,00,- (96,11%)
 - Sisa anggaran = Rp. 10.014.690,-
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Anggaran = Rp. 178.100.000,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 177.702.017,80,- (99,78 %)
 - Sisa anggaran = Rp.397.982,-
26. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Anggaran = Rp. 41.835.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 35.597.990,- (85,09 %)
 - Sisa anggaran = Rp.6.237.010,-
27. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
- Anggaran = Rp. 686.879.582,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 675.832.633,09,- (98,39%)
 - Sisa anggaran = Rp. 11.046.949,-
28. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- Anggaran = Rp. 190.917.500,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 178.069.835,81,- (93,27%)
 - Sisa anggaran = Rp. 12.847.664,-
29. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
- Anggaran = Rp. 221.963.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 219.058.486,00,- (98,69 %)
 - Sisa anggaran = Rp. 2.904.514,-

- 
30. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- Anggaran = Rp. 84.145.250,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 81.410.620,00,- (96,75%)
 - Sisa anggaran = Rp. 2.734.630,-
31. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- Anggaran = Rp. 125.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 124.904.735,- (99,92 %)
 - Sisa anggaran = Rp. 95.265,-
32. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
- Anggaran = Rp. 115.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 106.357.194,00,- (92,48%)
 - Sisa anggaran = Rp. 8.642.806,-
33. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
- Anggaran = Rp. 563.069.659,-
 - Realisasi Fisik = 100
 - Realisasi Keuangan = Rp. 560.057.011,00,- (99,46%)
 - Sisa anggaran = Rp. 3.012.648,-
34. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
- Anggaran = Rp. 1.100.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100.00%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 1.094.214.952,00,- (99,47%)
 - Sisa anggaran = Rp. 5.785.048,-
35. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- Anggaran = Rp. 9.583.293,-
 - Realisasi Fisik = 100 %
 - Realisasi Keuangan = Rp. 8.013.250,- (83,62%)
 - Sisa anggaran = Rp. 1.570.043,-
36. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Anggaran = Rp. 44.217.600,-
 - Realisasi Fisik = 100 %
 - Realisasi Keuangan = Rp. 44.180.600,00,- (99,92%)
 - Sisa anggaran = Rp. 37.000,-

- 
37. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
- Anggaran = Rp. 144.802.400,-
 - Realisasi Fisik = 100 %
 - Realisasi Keuangan = Rp. 144.734.400,00,- (99,95%)
 - Sisa anggaran = Rp. 68.000,-
38. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Anggaran = Rp. 242.999.510,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 238.045.378,- (97,96%)
 - Sisa anggaran = Rp.4.954.132,-
39. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
- Anggaran = Rp. 109.780.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 81.529.849,- (74,27%)
 - Sisa anggaran = Rp.28.250.151,-
40. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Anggaran = Rp.80.000.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp. 69.569.000,00,- (86,96%)
 - Sisa anggaran = Rp.10.431.000,-
41. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
- Anggaran = Rp.115.620.000,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp.114.823.520,- (99,31%)
 - Sisa anggaran = Rp.796.480,-
42. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
- Anggaran = Rp.83.424.538,-
 - Realisasi Fisik = 100%
 - Realisasi Keuangan = Rp.83.394.330,- (99,96%)
 - Sisa anggaran = Rp.30.208,-

- 
43. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
- | | |
|--------------------|--------------------------|
| Anggaran | = Rp. 8.160.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 8.160.000,- (100%) |
| Sisa anggaran | = Rp.0,- |
44. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| Anggaran | = Rp.309.735.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp.286.494.719,- (92,50%) |
| Sisa anggaran | = Rp.23.240.281,- |
45. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| Anggaran | = Rp.107.000.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp.100.693.918,- (94,11%) |
| Sisa anggaran | = Rp.6.306.082,- |
46. Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| Anggaran | = Rp.34.920.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp.28.819.350,00,- (82,53%) |
| Sisa anggaran | = Rp.6.100.650,- |
47. Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| Anggaran | = Rp.55.251.250,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp.46.916.595,00,- (84,91%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 8.334.655,- |

Dari 47 Sub Kegiatan diatas, ada 8 sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90 %, penyebabnya antara lain :

- Sisa anggaran yang berasal dari sisa gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.279.658.200
- Sisa anggaran dari rincian belanja sub kegiatan yang tidak terealisasi
- Efisiensi anggaran
- Sisa Tender



Sementara 39 kegiatan lainnya dapat mencapai target yang diharapkan, baik dari pencapaian fisik maupun realisasi keuangan.

Analisis Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang menunjang Pencapaian target kinerja

Secara Umum Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah berlandaskan kepada perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan pada RPJMD, maupun Renstra Dinas Perhubungan, yang pada dasarnya sudah menunjang tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja seperti yang sudah dijelaskan pada BAB II poin C.1 diatas, dapat disimpulkan yaitu upaya yang dilakukan adalah terkait Konektivitas dan terkait Keselamatan, antara lain:

1. Terkait Konektivitas

1. Meningkatkan Prasarana Perhubungan
 - a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) serta melakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - Melakukan rehabilitasi saluran air jalan pada Kawasan terminal Koto Nan IV Payakumbuh
 - Pemasangan CCTV di Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
 - Pembangunan WC pada Terminal Bukit Surungan Padang Panjang, Kota Padang Panjang
 - Telah selesainya Pemasangan Kanopi untuk kenyamanan tempat pemungutan retribusi di terminal Sago Painan
 - b) Melakukan penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan di jalan Provinsi
 - Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan di ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah – Purus, Kota Padang
 - Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan di ruas Jalan P.056 Simp. Padang Aro - Lubuk Malako Kab. Solok Selatan
 - Pemasangan Rambu - Rambu di Kawasan Mesjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang

- 
- Pemasangan Rambu Penunjuk Jurusan dalam mendukung KSPN di Kab.Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan.
- c) Melakukan perencanaan prasarana perhubungan, serta peningkatan dan Pengawasan prasarana perhubungan
- Melakukan Penyusunan Dokumen perencanaan di Terminal Tipe B Payakumbuh dan Terminal Sago Painan
 - Penyusunan dokumen P3D Pelabuhan.
 - Melakukan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2. Meningkatkan angkutan yang sesuai standar
- Melakukan Pengawasan serta survey pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kapal penyeberangan berdasarkan PM 62 tahun 2019 tentang standar minimal angkutan penyeberangan
 - Melakukan Pemeriksaan laik jalan terhadap angkutan yang beroperasi
3. Meningkatkan Akses Transportasi di Daerah Terpencil
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Angkutan Perintis (DAMRI) dan Kapal Perintis di pelabuhan – pelabuhan singgah
4. Mengoptimalisasi trayek angkutan umum
- Pelaksanaan Survey Load Faktor Angkutan Umum, yang hasilnya dapat digunakan untuk penghitungan kebutuhan armada angkutan umum, mengetahui data – data perizinan angkutan umum, dan untuk mengetahui angkutan yang melakukan penyimpangan trayek.
 - Tersedianya Pelayanan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)
5. Meningkatkan Kualitas SDM dalam Pelayanan Jasa Transportasi
Melaksanakan pembinaan SDM di 5 Terminal Tipe B (Terminal Sago Painan Kab Pesisir Selatan, Terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang, Terminal Koto Nan IV Kota Payakumbuh, Terminal Piliang Kab Tanah Datar, dan Terminal Kota Sawahlunto)



2. Terkait Keselamatan

1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat / stakeholder tentang aturan lalu lintas
 - a) Melaksanakan Rapat Koordinasi FLLAJ Prov. Sumbar dengan semua pihak terkait sebanyak 11 kali, serta adanya tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil rapat Forum LLAJ yang dilakukan, seperti adanya Pemilihan Pelajar Pelopor sebagai salah satu tindak lanjut hasil rapat Forum LLAJ.
 - b) Melakukan Sosialisasi keselamatan LLAJ (Tahun 2022 di Kab. Tanah Datar, Kab Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya, Kep. Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok Selatan)

2. Meningkatkan moda transportasi dalam kondisi baik
 - Melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan (Rampcheck)
 - Memfasilitasi pertemuan (Rakor) antar penguji se Sumatera Barat untuk peningkatan kapasitas penguji dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan uji kendaraan
 - Melakukan Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di UPUBKB kab / Kota Sumatera Barat

3. Meningkatkan Kualitas petugas Lalu Lintas

Upaya dalam meningkatkan volume penugasan dilapangan adalah:

 - Pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pengawasan Kendaraan Bermotor di Jalan (STPJ), antara lain yaitu:
 - a) Pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan di terminal
 - b) Pada kunjungan Pejabat Negara ke Provinsi Sumatera Barat
 - c) Pada pelaksanaan kegiatan Subuh Mubaroqah yang diselenggarakan oleh OPD Provinsi Sumatera Barat
 - d) Pada pelaksanaan Car Free Dat (CFD) yang diselenggarakan oleh OPD Provinsi Sumatera Barat
 - e) Pada peringatan hari – hari besar yang melibatkan masyarakat sehingga menyebabkan padatnya pergerakan lalu lintas
 - f) Pada lokasi bencana alam yang menyebabkan gangguan terhadap pergerakan lalu lintas

- 
- Pelaksanaan Razia Gabungan dengan instansi terkait dengan pola sidang ditempat (GAPOLSIPAT) pada tahun 2022 dengan target pelaksanaan di Kab / Kota Sumatera Barat, antara lain:
 - Tanggal 7 – 8 Maret 2022 (Kab Dharmasraya)
 - Tanggal 23 – 24 Maret 2022 (Terminal Barih Solok)
 - Tanggal 30 – 31 Maret 2022 (Kab 50 Kota)
 - Tanggal 18 – 19 April 2022 (kab padang pariaman)
 - Tanggal 15 – 16 Juni 2022 (Kota Bukittinggi)
 - Tanggal 5 – 6 Juli 2022 (Kab Pasaman Barat)
 - Tanggal 25 – 26 Juli 2022 (Kota Padang Panjang)

Dari hasil analisa terhadap program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dapat ditarik kesimpulan:

1. Konsistennya Perencanaan dengan proses pelaksanaan kegiatan
2. Adanya perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
3. Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai.
4. Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
5. Koordinasi yang intens baik internal maupun eksternal.

D. Realisasi Anggaran

Tabel III. 18 Rincian anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp.17.260.017.358

No	Belanja	Anggaran total	Realisasi (RP)	Persentase Per Anggaran Total
1	Belanja gaji dan tunjangan	8.500.719.778	8.221.061.578	96,71%
2	Belanja Penunjang Urusan	4.326.828.998	4.197.203.965	97,00%
3	Belanja Urusan	4.432.468.582	4.295.280.376	96,90%
	TOTAL	17.260.017.358	16.713.545.919	96,83%

Tabel III. 19 Realisasi anggaran tahun 2022 sesuai berdasarkan Program

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi Anggaran	
			RP	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12.827.548.776	12.418.265.542,80	96,81
B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.718.357.794	3.625.977.943,90	97,52
C	Program Pengelolaan Pelayaran	623.939.538	593.566.487,00	95,13
D	Program Pengelolaan Perkeretaapian	90.171.250	75.735.945,00	83,99
	JUMLAH	17.260.017.358	16.713.545.919	96,83



BAB IV PENUTUP

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2022, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat dikategorikan sangat Baik dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 103,62 %.

Berdasarkan uraian dan analisis kinerja dari belanja langsung sebagaimana diungkapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Dinas Perhubungan telah terealisasi fisiknya mencapai 100 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 96,83%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan, khususnya Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
2. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditekan/ menurun.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.

Penyusunan LAKIP 2022 masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi komitmen bersama, untuk perbaiki dan penyempurnaan LAKIP:

1. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target-target indikator kinerja (input, output, outcome) yang terukur.

- 
2. Mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja yang komprehensif dan transparan di masing-masing unit kerja dengan mengacu pada perkembangan data Indikator Kinerja Utama.
 3. Indikator Kinerja Utama betul – betul diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai program-program pemerintahan dan pembangunan.
 4. Agar setiap Unit Kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
 5. Masing-masing Unit Kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan pada capaian indikator kinerja input, output dan outcome.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Esselon II



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telp.(0751) 40330 – 40331 – Fax. 40332

PADANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERI NOFIARDI,SE.,MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Maret 2022

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

HERI NOFIARDI,SE.,MM
NIP. 196211101986111001

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek
		2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	79%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.942.449.099	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.197.397.002	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	943.666.538	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	120.676.000	APBD
JUMLAH		9.204.188.639	APBD

Padang, Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT


MAHYELDI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


HERI NOFARDI, SE., MM
NIP. 19621119 198611 1 001

Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No 1 Padang, Whatsapp : 0811 7538 111
PADANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERI NOFIARDI, SE.MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Oktober 2022

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

HERI NOFIARDI, SE.MM
NIP. 19621113 198611 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

OPD : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi	1. Jumlah Trayek Yang Diakses	5 Trayek
		2. Jumlah Penumpang terangkut angkutan umum	19.000.000 orang
2.	Meningkatnya kinerja lalu lintas di jalan provinsi	V/C Rasio di jalan Provinsi	0,52
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	71,00 BB
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	79%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.326.828.998	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.718.357.794	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	623.939.538	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	90.171.250	APBD
JUMLAH		8.759.297.580	APBD

Padang, Oktober 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



HERI NOFIARDI, SE. MM
NIP. 19621119198611 1 001



Penghargaan yang diterima Dinas Perhubungan Tahun 2022

Penghargaan yang diterima Dinas Perhubungan Tahun 2022
--

NIHIL
